

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 1.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang pemberdayaan masyarakat melalui Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Kabupaten Banyumas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

##### 1. Akses Informasi

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Banyumas belum berhasil dalam memberdayakan masyarakat desa untuk dapat mewujudkan akses informasi pembangunan desa yang transparan dan akuntabel. Pendamping desa masih kurang dalam mendampingi kelembagaan masyarakat dan masyarakat desa secara maksimal sehingga masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa belum dapat berdaya dan sadar terhadap hak-haknya, termasuk untuk mendapatkan akses informasi pembangunan desa.

##### 2. Inklusi dan Partisipasi

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Kabupaten Banyumas belum berhasil dalam memberdayakan masyarakat agar bisa berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan karena pendampingan yang ada baru dapat mewujudkan partisipasi yang ada masih sebatas mobilisasi, belum merupakan partisipasi yang sesungguhnya. Banyak stakeholder dan masyarakat yang belum tahu tentang hak-hak mereka dalam pembangunan, terutama masyarakat miskin, difabel dan marginal.

Jam kerja pendamping desa sebagian besar masih dialokasikan untuk mendampingi pemerintah desa sehingga pendampingan kepada lembaga masyarakat, kelompok masyarakat, kaum difabel, masyarakat miskin dan marginal masih kurang. Hal ini menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang pembangunan, dan kurangnya kesadaran

akan hak-hak masyarakat dalam pembangunan sehingga lembaga masyarakat, masyarakat umum, masyarakat miskin, difabel, dan kaum marginal tidak bisa berperan serta secara maksimal. Kurangnya pendampingan dari pendamping P3MD dalam memberdayakan lembaga masyarakat, masyarakat umum, masyarakat miskin, kaum difabel dan kaum marginal menyebabkan dan partisipasi mereka masih lemah, sehingga peran pemerintah desa masih dominan.

### **3. Akuntabilitas**

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) belum dapat mewujudkan penguatan akuntabilitas sosial di desa karena pendampingan yang ada belum dapat mewujudkan masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang mempunyai bargaining position yang tinggi dan berani untuk mengakses pertanggungjawaban pemerintah desa dan juga mengevaluasinya.

### **4. Kapasitas organisasi lokal**

P3MD gagal dalam memberdayakan masyarakat karena belum dapat meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan sebagai organisasi lokal di Kabupaten Banyumas dengan baik. Kapasitas organisasi lokal masih lemah karena belum pendampingan yang kurang intensif sehingga para pengurus organisasi lokal belum memiliki bekal yang cukup tentang ilmu-ilmu pemberdayaan. Selain karena kapasitas yang kurang, posisi lembaga kemasyarakatan desa menjadi lemah karena belum mempunyai legal standing yang sesuai dengan regulasi terbaru. Di Kecamatan Cilongok belum ada desa yang punya peraturan desa tentang LKD sesuai dengan regulasi terbaru. Lemahnya peran LKD tersebut menunjukkan adanya kegagalan dalam proses pemberdayaan yang dilakukan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD).

## **5.2. Saran**

### **1. Akses Informasi**

- a. Perlu dibentuk tim atau petugas Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) yang didanai oleh desa. Tugasnya adalah mengupdate website desa dengan informasi-informasi terkini tentang pembangunan dan desa dan juga tentang laporan kegiatan pembangunan. Informasi yang tersedia di website akan memudahkan masyarakat dalam mengakses sehingga mereka dapat berperan lebih kuat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan desa dan juga pengawasan pembangunan desa
- b. Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Pemerintah Kecamatan dan Pendamping desa P3MD lebih sering mendatangi lembaga masyarakat desa, kelompok masyarakat dan masyarakat umum dalam rangka penyadaran dan peningkatan kapasitas masyarakat, sekaligus menjadi penyambung informasi yang terputus.

### **2. Inklusi dan Partisipasi**

Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Pemerintah Kecamatan dan Pendamping P3MD lebih intens dalam mendampingi lembaga masyarakat, kelompok masyarakat, kaum difabel, masyarakat miskin dan marginal dalam rangka peningkatan kapasitas sekaligus memberikan penyadaran sehingga mereka bisa mendapatkan ruang yang lebih luas dan dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

### **3. Akuntabilitas**

Membuat system pengawasan berbasis masyarakat atau Community Based Monitory (CBM) agar masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang mempunyai bargaining position yang tinggi dan berani untuk mengakses pertanggungjawaban pemerintah desa dan juga mengevaluasinya.

#### 4. Kapasitas organisasi lokal

- a. Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Pemerintah Kecamatan dan Pendamping P3MD memfasilitasi agar setiap desa mempunyai peraturan desa tentang lembaga kemasyarakatan desa yang sesuai dengan regulasi terbaru
- b. Peningkatan kapasitas yang lebih intensif melalui pelatihan-pelatihan ataupun forum grup discussion kepada para pengurus lembaga kemasyarakatan desa agar mereka memiliki bekal ilmu yang cukup dalam menjalankan perannya untuk memberdayakan masyarakat

